

Islamophobia dan Tindakan terhadap Minoritas Muslim oleh Pemerintah dan Kelompok 969 di Myanmar Tahun 2012-2016

Renitha Dwi Hapsari

*Mahasiswa Program Studi Magister Hubungan Internasional
Universitas Airlangga Surabaya*

e-mail: rd.hapsari@yahoo.com

ABSTRACT

Islamophobia has become a global phenomenon since 9/11. It is not only happened in the West but spread around the world following the War on Terror policy. This article explains the influences of Islamophobia upon the rise of Buddhist Nationalism in Myanmar with its insecurity towards Moslem minorities within the country. As a rational response against Islamophobia, a number Buddhist extremists, such as 969, execute violent attacks towards Moslem minorities especially Moslem Rohingya. Patron-client relationship between the Government and Buddhist community make the violence even worse. In the end, Islamophobia and the rise of Buddhist Nationalism in Myanmar cause a prejudice, violence, discrimination, and exclusion towards all Muslim Minorities within the country.

Keywords: *islamophobia, the rise of Buddhist nationalism, patron-client, prejudice, exclusion, discrimination, violence, Myanmar, moslem minorities*

Islamophobia telah menjadi fenomena global sejak 9/11. Hal ini tidak hanya terjadi di Barat, tetapi menyebar ke seluruh dunia setelah kebijakan War on Terror. Artikel ini menjelaskan pengaruh Islamophobia terkait munculnya Nasionalisme Buddha di Myanmar dengan ketidakamanan minoritas muslim di dalam negeri tersebut. Sebagai respon rasional terhadap Islamophobia, sejumlah ekstrimis Budha, seperti 969, melakukan serangan kekerasan terhadap minoritas muslim terutama muslim Rohingya. Hubungan patron-klien antara Pemerintah dan masyarakat Buddhis membuat kekerasan bahkan lebih buruk. Pada akhirnya, Islamofobia dan bangkitnya nasionalisme Buddha di Myanmar menyebabkan prasangka, kekerasan, diskriminasi, dan pengucilan terhadap semua Minoritas Muslim di dalam negeri.

Kata kunci: *islamophobia, kebangkitan nasionalisme Buddha, patron-klien, prasangka, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, Myanmar, muslim minoritas*

Pendahuluan

Konsep mengenai islamophobia hingga saat ini masih menjadi perdebatan. Kata islamophobia itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Etienne Dinet dan Slima Ben Ibrahim pada tahun 1925 dalam "accès de délire islamophobe" (Allen 2010:5). Berbeda dengan sebelumnya, Caroline Fourest dan Fiammetta Venner mengklaim bahwa konsep islamophobia pertama kali dipakai ketika Revolusi Islam tahun 1979, guna menjelaskan tentang ketakutan terhadap kebangkitan Islam di Iran. Kemudian pada tahun 1980-an, islamophobia digunakan untuk menjelaskan ketakutan terhadap peningkatan imigran Muslim dari wilayah CIS ke Inggris. Al-Muhajiroun dan the Islamic Human Rights Commission (IHRC), kemudian menggunakan konsep

Islamophobia untuk menjelaskan ketakutan non-Muslim terhadap Islam dan pemeluknya.

Runnymede Trust (1997) menyatakan Islamophobia sebagai ketakutan atau kebencian terhadap Islam, sehingga menyebabkan ketakutan dan kebencian terhadap semua atau sebagian besar Muslim. Todd Green menyebutkan 3 hal yang menyebabkan islamophobia, yang meliputi: sejarah imperialisme Islam, ketidaktahuan serta rendahnya interaksi dengan Muslim, serta pengaruh media dan pernyataan pemerintah yang mengeneralisir pelaku teror dengan Muslim (Green dalam Feldman 2016). Dengan demikian, masyarakat yang tidak tahu (ignorance) dan kurang mengenal Muslim dengan baik, menerima stereotipe negatif dan ikut membenci Muslim. Dalam sejarahnya, Islam memang pernah menguasai wilayah Asia Barat, Afrika Utara, hingga Eropa melalui invasi yang dilakukan ketika masa Kekaisaran Turki Ottoman. Pada era kontemporer, ketakutan terhadap Islam dan Muslim juga semakin meningkat serta menyebar secara global seiring dengan kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang mengusung “War on Terror”, pasca pemboman gedung World Trade Center pada 11 September 2001 yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis Al Qaeda. Setelah itu, banyak sekali serangan teror yang terjadi di berbagai penjuru dunia yang diidentikkan dilakukan oleh jaringan kelompok Islam fundamentalis. Pemberitaan media internasional serta pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara-negara Barat juga semakin menekankan bahwa Muslim adalah pelaku teror. Hal tersebut membentuk stereotipe pada masyarakat secara global yang kemudian membenci Islam dan Muslim. Meski pada kenyataannya, pelaku teror hanya merepresentasikan sebagian kecil Muslim di dunia.

Islamophobia dan Kebangkitan Nasionalisme Religius di Myanmar

Erick C. Nisbet juga menyatakan bahwa ancaman simbolis Islam terhadap nilai, budaya, kepercayaan, dan tradisi kelompok lain; peningkatan imigrasi Muslim; kontak atau interaksi langsung antar kelompok dapat menimbulkan persepsi ancaman dan menjadi pemicu islamophobia (Nisbet 2015). Persepsi ancaman tersebut kemudian memicu respon dari kelompok lain untuk melindungi diri dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal ini lah yang kemudian membuat Islamophobia mempengaruhi peningkatan nasionalisme religius kelompok lain. Seperti pernyataan Jaffrelot (1993) bahwa nasionalisme religius berkembang dari upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu kelompok dengan identitas kultural (agama) tertentu.

Pada dasarnya, nasionalisme religius menggunakan agama atau religi untuk membentuk ikatan masyarakat dalam suatu bangsa, serta kesatuan nasional (Mastin 2008). Nasionalisme religius berkembang di berbagai penjuru dunia pada 1980-1990an (Claydon 2005). Terdapat beberapa bentuk nasionalisme religius yang berkembang di dunia, seperti nasionalisme Islam, Kristen, dan Buddha. Dalam kondisi tertentu, nasionalisme ini digunakan sebagai respon rasional yang digerakkan oleh ketakutan suatu kelompok terhadap ancaman atau kepentingan dari kelompok lain yang dianggap dapat membahayakan identitas kelompok tersebut (Claydon 2005). Pada dasarnya, nasionalisme religius menolak sistem sekularisme yang diterapkan di era modern (Claydon 2005). Dalam sistem sekularisme, terjadi pemisahan antara institusi pemerintah dan agama. Selain itu, sistem sekularisme juga mengusung persamaan hak dan perlakuan terhadap kelompok yang berbeda identitas -agama. Hal ini tidak dikehendaki oleh kelompok identitas tertentu yang sebelumnya mendapatkan perlakuan yang istimewa dari pemerintahnya.

Nasionalisme religius cenderung menggunakan keunggulan dari satu kelompok dari kelompok lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, kelompok mayoritas umumnya menggunakan hal ini sebagai senjata untuk melawan kelompok lain (minoritas). Dengan demikian, kelompok mayoritas berkuasa dan mendapatkan hak-hak istimewa sedangkan kelompok minoritas akan teralienasi dan didiskriminasi. Dalam kasus ini, sesuai dengan pernyataan Suwanna Satha-Anand, Buddhisme memiliki hubungan patron-klien dengan pemerintah (Juergensmeyer 1994). Berdasarkan hal tersebut, kelompok Buddha mendapatkan hak-hak istimewa, seperti perlindungan dari pemerintah dari ancaman kelompok lain secara internal dan eksternal. Sebagai timbal baliknya, kelompok Buddha juga harus memberikan dukungan dan legitimasinya terhadap pemerintah yang berkuasa. Di Myanmar, Buddhisme digunakan sebagai pondasi pembangunan nasional negara, sekaligus aturan bagi kehidupan sosial masyarakat.

Ketika kelompok mayoritas yang didukung oleh pemerintah memutuskan untuk memaksakan ide nasionalismenya terhadap kelompok lain, kondisi ini dapat membahayakan bagi kelompok minoritas. Kelompok minoritas akan hidup dalam ketakutan dan ancaman, mereka tidak memiliki ruang hidup, bahkan lebih ekstrim kelompok minoritas akan dieliminasi. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Barker (2009), yang menjelaskan bahwa sentimen berkaitan dengan nasionalisme religius terjadi ketika posisi kepercayaan tertentu menjadi sentral pada suatu bangsa. Catarina Kinnvall (2004) menyatakan bahwa perpaduan antara agama dan nasionalisme pada satu sisi dapat menciptakan gerakan persatuan, kepercayaan, dan keamanan; namun di sisi lain, juga dapat menimbulkan kebencian dan kekerasan di negara yang rentan, tidak stabil, dan multietnis. Kondisi tersebut merepresentasikan peristiwa yang terjadi di Myanmar belakangan ini.

Hubungan patron-klien antara kelompok Buddha dan pemerintah di Myanmar telah terjalin sejak sebelum masa kemerdekaan. Pada masa sebelumnya, *Buddhist nationalism* di Myanmar berkembang ketika masa penjajahan, sebagai bentuk upaya melawan kolonialisme. Para aktivis biksu atau yang dikenal sebagai Pongyi, merupakan aktor utama yang melawan penjajah Inggris.¹ Sejak saat itu, biksu memiliki peran sentral di Myanmar. Sebagai timbal baliknya, kelompok Buddha yang terancam oleh upaya penyebaran agama Kristen dan Islam selama masa kolonisasi, mendapatkan perlindungan dari kelompok nasionalis—yang kemudian menjadi pemerintah.

Selama masa penjajahan, kelompok biksu sudah mengalami ketakutan terhadap banyaknya imigran Muslim yang masuk ke wilayah Myanmar dari wilayah jajahan Inggris lainnya—India Timur². Perpindahan secara besar-besaran yang dilakukan oleh Muslim dari India merupakan bentuk penerapan mengikuti kebijakan di era kolonialisme, yang kemudian membuat dominasi Muslim di sektor ekonomi. Sejak saat itu, Muslim dikenal sebagai kelompok ekspansionis. Sebagian dari mereka, yang dikenal dengan *Chettiar* memberikan pinjaman kepada para petani ketika terjadi Depresi Ekonomi di Myanmar, para petani yang tidak dapat mengembalikan pinjaman pada akhirnya kehilangan tanah dan mata pencahariannya (ICG 2013). Hal tersebut menjadi awal kebencian sekaligus ketakutan dari kelompok biksu di Myanmar.

Kelompok minoritas termasuk Muslim Rohingya justru mendukung penjajah Inggris dan melawan pasukan Burmese Independence Army (BIA) yang didukung oleh Jepang (Biver 2014). Hal tersebut dianggap sebagai bentuk pemberontakan Muslim di

¹Myanmar merupakan salah satu negara di Asia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Buddha

² Yang pada tahun 1947 menjadi negara Bangladesh.

Myanmar. Dalam perkembangan selanjutnya, citra Muslim sebagai kelompok ekspansionis juga kembali muncul ke permukaan seiring dengan meningkatnya jumlah populasi Islam akibat perkawinan campuran, sehingga menimbulkan konspirasi bahwa Muslim ingin mengambil alih posisi dominasi dalam negara. Kelompok Buddha ekstrimis menganggap bahwa laki-laki Muslim menargetkan wanita pemeluk agama Buddha untuk dinikahi. Biksu ekstrimis melihat hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kampanye terkoordinir dalam upaya menghilangkan generasi penerus pemeluk Buddha (Hutton 2014). Tidak hanya itu, aturan dalam Islam yang memperbolehkan poligami juga semakin meningkatkan kebencian dan ketakutan tersebut.

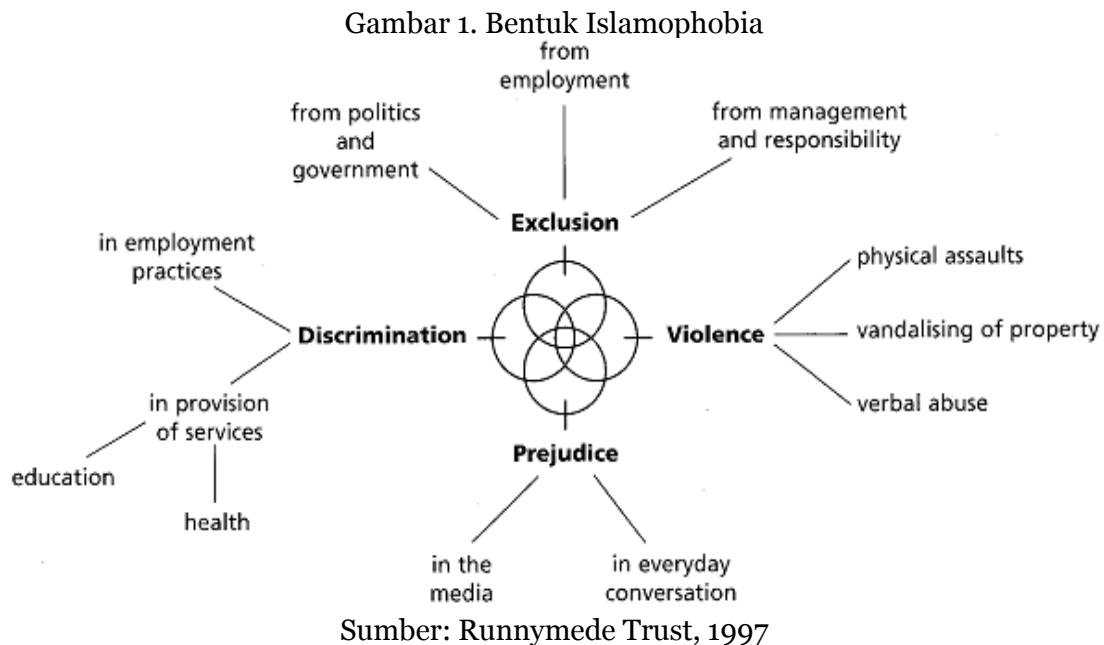
Di sisi lain, ada beberapa faktor eksternal yang memicu meningkatnya kebencian dan ketakutan kelompok Buddha ekstrimis terhadap Muslim, seperti: perusakan patung Buddha yang dilakukan oleh Taliban di Bamiyan - Afghanistan; adanya kelompok Islam separatis di Thailand Selatan yang juga dianggap memiliki hubungan dengan organisasi Islam jihadis; serta perubahan di Pakistan, Bangladesh, dan Malaysia yang sebelumnya merupakan negara dengan populasi Buddha terbesar saat ini juga didominasi oleh populasi Muslim.³ Kelompok Buddha ekstrimis takut bahwa peristiwa yang terjadi di beberapa negara tersebut, suatu saat juga terjadi di Myanmar. Sebelumnya, kelompok Muslim pernah menuntut hak penuh sebagai warga negara serta otonomi khusus di wilayah utara negara bagian Rakhine (ICG 2013). Mereka juga beranggapan bahwa peradaban Islam tidak hanya berupaya untuk menguasai Myanmar tetapi seluruh dunia secara global (Biver 2014).

Robert Hutton menyatakan bahwa *Buddhist nationalism* kembali bangkit di Asia sejak tahun 2001 (Hutton 2014). Berbeda dengan sebelumnya, peningkatan *Buddhist nationalism* pada masa ini dipelopori oleh biksu ekstrimis (Kristanti 2014) atau ultranasionalis, yang melakukan gerakan kekerasan melawan kelompok yang dianggap mengancam eksistensi agama dan pemeluk Buddha. Juergensmeyer menyatakan bahwa nasionalisme religius merupakan tampilan permukaan untuk menutupi kelompok ekstrimis. David Claydon (2005) menyatakan bahwa penganut *Buddhist nationalism* menolak nilai-nilai Kristen, Islam, dan ideologi lainnya. Kelompok Buddha ekstrimis juga menganggap bahwa pemeluk Islam dan Kristen sebagai kelompok yang agresif dan eksklusif. Hal ini lah yang juga menjadi dasar prasangka buruk kekerasan, diskriminasi, eklusi, dan yang dilakukan oleh Kelompok 969 di Myanmar terhadap minoritas Muslim.

Tindakan terhadap Minoritas Muslim di Myanmar

Islamophobia dapat terus meningkat menjadi lebih eksplisit, ekstrim, dan berbahaya (Richardson 1997:1). Islamophobia kemudian diaktualisasikan dalam beberapa tindakan terhadap Muslim, yang meliputi: 1) Kekerasan yang terdiri atas Kekerasan fisik, Kekerasan verbal, dan Perusakan bangunan – terutama institusi atau lembaga Islam seperti masjid, sekolah, dan makam tokoh agama; 2) Diskriminasi dalam pekerjaan dan pelayanan publik, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan; 3) Eksklusi dari pekerjaan, Eksklusi dari pekerjaan manajerial dan tanggung-jawab besar, serta Eksklusi dalam politik dan pemerintahan; 4) Prasangka buruk oleh media, serta percakapan sehari-hari.

³ Diperoleh dari berbagai sumber



Prasangka Buruk terhadap Minoritas Muslim

Islamophobia sangat berdampak besar terhadap seluruh minoritas Muslim di Myanmar. Kebencian dan ketakutan terhadap Muslim juga menimbulkan prasangka buruk terhadap semua minoritas Muslim di Myanmar yang berasal dari berbagai macam etnis. Selain kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya dan Kaman, etnis asli Burma juga terkena dampaknya. Mark Farmaner menyatakan bahwa Muslim yang berasal dari etnis Burma juga mendapatkan perlakuan layaknya orang asing (McPherson 2015). Berdasarkan kebijakan imigrasi yang baru, meski seseorang berasal dari etnis Burma tetapi beragama Islam maka secara otomatis dia dianggap sebagai keturunan campuran. Bahkan setiap Muslim wajib meregistrasikan diri sebagai ras India atau Pakistan untuk mendapatkan kartu registrasi nasional, meski faktanya mereka bukan dari dan tidak memiliki keluarga disana.

Prasangka buruk terhadap minoritas Muslim di Myanmar juga dapat dilihat dari kehidupan sosial sehari-hari masyarakat Myanmar. Semua Muslim di Myanmar mendapat julukan *kalar* yang dalam bahasa Sanskrit berarti Hitam (Allchin 2012). Seperti orang-orang Barat yang memandang rendah orang Negro dari Afrika, begitu pula yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar. Bahkan, perlakuan tersebut pada akhirnya juga dialami oleh minoritas Muslim lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh kampanye atau pidato yang dilontarkan oleh Ashin Wirathu yang sering kali menyebut Muslim sebagai *Mad Dog* atau *Wolf* yang berupaya untuk memburu hewan lainnya – pemeluk Buddha (Kaplan 2015).

Diskriminasi terhadap Minoritas Muslim

Minoritas Muslim di Myanmar juga mengalami diskriminasi, terutama etnis Rohingya. Hal ini tidak terlepas dari eksklusi pemerintah yang tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar berdasarkan UU Kewarganegaraan tahun 1982. Anak-anak minoritas Muslim dilarang masuk ke sekolah publik (www.cbc.ca, diakses 10 Juni 2015). Bahkan, Human Rights Watch melaporkan bahwa beberapa anak di bawah umur dipaksa menjadi tenaga kerja tanpa diberi upah. Muslim Rohingya juga sering

kali dipekerjakan sebagai tenaga kasar tanpa dibayar untuk membantu proyek yang dijalankan oleh pemerintah, seperti dalam proyek pembangunan jalan.

Mereka juga tidak diperbolehkan untuk bekerja di bidang pelayanan publik, seperti hukum, militer, atau kesehatan (Graham 2015). Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mencegah minoritas Muslim mendapatkan kekuasaan yang dapat digunakan memperjuangkan hak-hak asasi mereka sebagai manusia atau warga negara. Pemerintah juga memberikan pelayanan kesehatan yang sangat minimal bagi minoritas Muslim terutama etnis Rohingya. Salah seorang Muslim menyatakan bahwa di wilayah Rakhine tidak ada dokter, obat atau vaksin yang cukup untuk merawat pasien (Szep 2013). Dalam salah satu artikel yang dimuat di *The Diplomat* juga diketahui bahwa MSF (*Medecine Sans Frontiers*) atau “*Doctors Without Borders*” juga sempat dilarang masuk ke Myanmar (www.thediplomat.com, diakses pada 12 Juni 2016). Dapat dikatakan ini adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar untuk mengalienasi minoritas Muslim, terutama Rohingya.

Pemerintah Myanmar juga membatasi mereka membangun tempat ibadah (Kloes 2011). Meski aturan Kementerian Agama menyatakan memperbolehkan pembangunan atau perbaikan tempat ibadah sesuai dengan peningkatan jumlah pemeluk agama pada suatu wilayah, namun hal ini tidak berlaku bagi minoritas Muslim. Minoritas Muslim mungkin hanya mendapatkan izin di tingkat lokal. Mereka dipersulit mengurus izin di tingkat yang lebih tinggi, umumnya prosesnya diperlambat atau ditolak. Pada akhirnya, jika mereka terbukti tetap membangun tempat ibadah tanpa izin otoritas yang berwenang maka tempat ibadah yang sudah terbangun harus dihancurkan.

Beberapa desa di Myanmar melarang Muslim masuk ke dalam wilayahnya. Hal ini berawal di desa *Thaungtan* di wilayah *Irrawaddy* yang kemudian diikuti oleh beberapa desa lainnya (Assalam 2016). Kebencian dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Buddha ekstrimis pada akhirnya juga menimbulkan ketakutan pada minoritas Muslim di Myanmar sehingga mereka berupaya untuk mencari tempat yang aman ke daerah-daerah lainnya. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan, karena penduduk di desa atau wilayah tersebut juga takut mendapat serangan dari kelompok Buddha ekstrimis jika terbukti melindungi atau berafiliasi dengan minoritas Muslim. Sehingga pada akhirnya desa-desa tersebut secara terang-terangan memasang papan pengumuman yang melarang Muslim masuk ke dalam wilayahnya.

Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa minoritas Muslim terisolasi di wilayahnya sendiri. Minoritas Muslim yang ingin melarikan diri pada akhirnya hanya terdampar di tenda-tenda pengungsian. Mereka tidak dapat keluar lintas batas negara karena Pemerintah Myanmar dan negara-negara lain menerapkan kebijakan yang sangat ketat di wilayah perbatasan. Mereka juga tidak dapat kembali ke rumahnya karena sudah hancur akibat kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Buddha ekstrimis. Selain itu, trauma atas kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi membuat mereka enggan untuk kembali.

Kekerasan oleh Kelompok 969

Kekerasan terhadap minoritas Muslim di Myanmar dilakukan melalui kekerasan fisik, verbal dan perusakan bangunan atau tempat ibadah. Kekerasan tersebut dilakukan

oleh biksu yang tergabung dalam Gerakan 969,⁴ yang diketuai oleh Ashin Wirathu – yang juga memperkenalkan diri sebagai Osama bin Ladennya Myanmar. Kekerasan pada awalnya terjadi di wilayah Rakhine yang kemudian menyebar ke beberapa wilayah lainnya, seperti Meiktila dan Laisho. International Crisis Group (ICG) menyatakan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi pada etnis Rohingya, kekerasan terhadap minoritas Muslim juga terjadi pada etnis Kaman dan etnis lainnya yang beragama Islam.

Kekerasan pertama terjadi pada Juni 2012, yang menyebabkan puluhan orang meninggal dunia, ratusan rumah terbakar, serta sedikitnya 75.000 etnis Rohingya mengungsi (Arbour 2012). Kekerasan kembali terjadi pada bulan Oktober selama enam hari berturut-turut, yang kemudian menyebabkan 140 orang meninggal dan peningkatan jumlah pengungsi melebihi 110.000 orang (Arbour 2012). Banyaknya pengungsi yang melarikan diri keluar lintas batas negara juga pada akhirnya mengancam keamanan dan kedaulatan wilayah negara-negara lain yang berbatasan dengan Myanmar, baik di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Selatan.

Setahun kemudian, pada bulan Maret 2013, kekerasan terhadap minoritas Muslim kembali terjadi. Kali ini kekerasan terjadi di Meiktila (Myanmar Tengah) yang menyebabkan 40 orang meninggal dunia (Strathem 2013). Kelompok Buddha juga menyerang masjid dan membakar lebih dari 70 rumah orang Muslim di Oakkan, Rangoon Utara (Strathem 2013). Kejadian tersebut menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 9 orang mengalami luka-luka. Pada 28-29 Mei, kekerasan terhadap minoritas Muslim terjadi di wilayah Laisho (timur laut), membakar sejumlah rumah dan toko warga Muslim, sebuah masjid, serta pesantren (Handoko 2013). Dalam kekerasan tersebut 1 orang meninggal dunia dan 4 orang terluka.

Ashin Wirathu juga beberapa kali melontarkan kekerasan verbal terhadap minoritas Muslim. Berikut pernyataan keras yang dikeluarkan oleh Ashin Wirathu dalam Majalah *The Diplomat*,

Muslims are fundamentally bad.

Islam is a religion of thieves, they do not want peace.

If Myanmar wants to live in peace, Buddhists and Muslims have to live separately (www.thediplomat.com, diakses pada 12 Juni 2016).

Kekerasan verbal yang menimbulkan kebencian terhadap minoritas Muslim juga disebar oleh kelompok 969 melalui media sosial. Rekaman video pidato Ashin Wirathu di media sosial yang berisi kebencian juga telah ditonton oleh ribuan orang.

Sebelumnya, pada tahun 2003 Ashin Wirathu pernah dipenjara karena melakukan kampanye nasional untuk memboikot bisnis yang dilakukan oleh Muslim (Hodal 2013). Pada tahun 2012, Ashin Wirathu dikeluarkan dari penjara setelah diberi amnesti oleh pemerintahan Thein Sein sebagai bentuk upaya demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia di Myanmar. Namun setelah keluar dari penjara, Ashin Wirathu kembali menyebarkan kebencian terhadap minoritas Muslim. Ashin Wirathu melakukan kampanye nasional 969 yang menyarankan kepada seluruh pemeluk Buddha di Myanmar agar hanya membeli produk yang dijual oleh pemeluk agama Buddha (Walton dan Hayward 2014).

⁴ 969 is symbol of Triple Gems. It is also used to counter 786 that used to indicate Muslim-owned businesses that served halal foods. 786 used among Muslims in Asian countries (Matthew J. Walton & Susan Hayward, 2014).

Penganutnya menyebarkan stiker 969 di toko-toko, usaha, dan kendaraan umum yang dimiliki oleh pemeluk Buddha, sehingga pemeluk Buddha lebih mudah untuk mengenali dan membedakan antara pemilik Buddha dan Muslim. Hal tersebut otomatis berdampak terhadap pengusaha Muslim. Shwe Muang menyatakan bahwa di Yangon Utara, seorang klien yang beragama Buddha membatalkan kontraknya dengan pengusaha Muslim karena takut bangunannya diserang oleh pengikut kelompok 969 (Marshall 2013). Shwe Muang juga menekankan bahwa hal tersebut dapat terjadi di wilayah bagian Myanmar lainnya, baik terhadap pemilik usaha kecil hingga menengah.

MaBaTha (Organization for the Protection of Race and Religion) yang merupakan asosiasi biksu di Myanmar yang memiliki afiliasi dengan kelompok 969 juga membuat petisi kepada pemerintah. MaBaTha mendapatkan dukungan lebih dari satu juta penduduk di Myanmar untuk membuat proposal rancangan undang-undang yang diusulkan kepada parlemen (Nilsen 2013). RUU tersebut meliputi aturan mengenai pernikahan bagi wanita pemeluk Buddha, Perpindahan Agama, Monogami, serta Kontrol Populasi (Nilsen 2013). RUU tersebut berupaya untuk membatasi pernikahan campuran antara wanita pemeluk Buddha dengan laki-laki yang berbeda agama tanpa persetujuan dari orang tua atau wali yang diakui secara legal oleh hukum, serta otoritas pemerintah; membatasi perpindahan agama yang dilakukan oleh warga negara di bawah umur 18 tahun, dengan syarat yang ketat; melarang pernikahan lebih dari satu kali; serta melarang memiliki anak lebih dari dua kepada kelompok yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pada dasarnya semua RUU tersebut ditujukan untuk membatasi peningkatan jumlah penduduk Muslim di Myanmar.

Kekerasan dan Eksklusi Pemerintah terhadap Minoritas Muslim

Kekerasan yang dialami minoritas Muslim di Myanmar tidak hanya dilakukan oleh kelompok 969. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa, pemerintah dan biksu di Myanmar memiliki hubungan patron-klien. Ketika keberadaan minoritas Muslim di Myanmar menjadi ancaman bagi kelompok biksu maka hal tersebut juga menjadi ancaman bagi pemerintah. Agar pemerintah tetap mendapatkan dukungan dan legitimasi dari masyarakat Myanmar yang mayoritas merupakan pemeluk agama Buddha, maka secara otomatis pemerintah juga berupaya untuk mengakomodasi kepentingan dari pemeluk Buddha.

ICG melaporkan bahwa ketika terjadi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Buddha ekstrimis terhadap minoritas Muslim Rohingya dan Kaman, aparat pemerintah hanya membiarkan hal tersebut terjadi tanpa melakukan tindakan apa-apa untuk mencegahnya. Pemerintah Thein Sein juga menyatakan bahwa 969 merupakan simbol perdamaian dan Ashin Wirathu merupakan anak atau keturunan dari Buddha (Marshall 2013). Selain itu, pemerintah Thein Sein dengan jelas menyatakan kepada media bahwa Rohingya yang merupakan etnis Muslim dengan jumlah terbesar di Myanmar bukan merupakan warga negara Myanmar. Presiden Thein Sein menyatakan bahwa *“There are no Rohingyas among the races in Burma, We only have Bengalis who were brought for farming during British rule”* (Gearan 2013). Presiden Thein Sein menganggap etnis Rohingya sebagai orang Bengali yang masuk ke wilayah Myanmar karena dibawa oleh penjajah Inggris untuk bertani. Dengan demikian, etnis Rohingya tidak memiliki hak layaknya etnis lainnya yang diakui sebagai warga negara oleh Pemerintah Myanmar. Hal ini merupakan bentuk eksklusi pemerintah terhadap etnis Rohingya.

Selama masa kampanye, partai politik dominan di Myanmar juga menghindari isu-isu yang berkaitan dengan masalah Rohingya agar tetap mendapatkan dukungan dari pemeluk Buddha ekstrimis. Bahkan, Aung San Suu Kyi yang selama ini dikenal sebagai seorang demokrat (NLD – National League for Democracy) yang menjunjung HAM juga diam saja. NLD tidak ingin kelompok oposisi dan masyarakat menilai bahwa partainya *soft* terhadap Muslim (Nilsen 2015). NLD juga tidak ingin kehilangan dukungan dari *swing voters*, yang berpindah haluan ketika mereka salah melakukan gerakan.

Minoritas Muslim di Myanmar juga tidak memiliki calon kandidat yang dapat merepresentasikan dan mengakomodasi kepentingan mereka. Di Myanmar terdapat lebih dari 6.000 orang kandidat yang bertarung dalam pemilihan, 5.130 orang kandidat merupakan wakil dari pemeluk Buddha, 903 orang kandidat mewakili pemeluk Kristen, dan hanya terdapat 28 orang kandidat yang mewakili Muslim (Win 2015). UEC (Union Election Commission) menolak ratusan calon kandidat yang mayoritas Muslim, karena orang tua mereka tidak terdaftar sebagai warga negara Myanmar sehingga dapat dikatakan melanggar Hukum Pemilihan. Sebelumnya, Partai-partai besar juga memutuskan untuk menghilangkan semua calon kandidatnya yang beragama Islam untuk menghindari penurunan dukungan dari masyarakat yang mayoritas pemeluk Buddha, termasuk dukungan dari kelompok Buddha ekstrimis. Selain jumlah yang sangat sedikit, 28 calon kandidat Muslim tersebut⁵ mewakili partai yang kurang dikenal publik sehingga kecil sekali kemungkinan untuk memenangkan pemilihan. Dengan demikian, sangat kecil juga kesempatan atau ruang bagi Muslim untuk masuk dalam pemerintahan.

Tidak berhenti sampai disitu, selama pemilihan umum berlangsung etnis Rohingya juga tidak memiliki hak untuk memilih. Hal ini tidak terlepas dari keputusan otoritas pemerintah yang mencabut kembali Kartu Putih –yang merupakan kartu identitas nasional sementara bagi etnis Rohingya (Win 2015). Dengan demikian minoritas Muslim hanya dapat mengandalkan kemampuannya sendiri untuk melindungi diri dan mempertahankan eksistensi kelompoknya.

Kesimpulan

Islamophobia telah membuat minoritas Muslim di Myanmar mengalami kekerasan, diskriminasi, eksklusi dan prasangka buruk. Hal tersebut tidak hanya menimpa etnis Rohingya yang merupakan minoritas Muslim dengan jumlah terbesar di Myanmar, tetapi juga etnis lainnya seperti Kaman dan Burma yang beragama Islam. Hubungan patron-klien antara pemeluk Buddha dan pemerintah membuat situasi dan kondisi di Myanmar semakin mengancam eksistensi minoritas Muslim di Myanmar. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang cenderung pro terhadap kelompok Buddha ekstrimis guna terus mendapatkan dukungan dan legitimasi, justru memperlihatkan bahwa Pemerintah Myanmar tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh pemeluk Buddha. Hal tersebut juga dapat dilihat selama masa kampanye dan pemilihan umum di Myanmar yang enggan membahas resolusi bagi etnis Rohingya. Meski saat ini Partai NLD yang dianggap lebih demokratis telah memenangkan pemilihan, hal ini tidak menjamin masa depan yang lebih baik bagi minoritas Muslim di Myanmar. Seperti sebelumnya, beberapa partai menarik keikutsertaan calon kandidat Muslim dalam pemilihan karena takut dapat berdampak terhadap penurunan tingkat dukungan kepada partainya. Maka, tidak menutup kemungkinan bahwa partai

⁵ Calon kandidat Muslim yang lolos seleksi UEC kemungkinan besar mewakili etnis yang bukan Rohingya

pemenang pemilu saat ini tetap pada posisinya untuk “mengabaikan” penyelesaian masalah minoritas Muslim, untuk mendapatkan dukungan kembali pada proses pemilihan berikutnya.

Persoalan yang dihadapi oleh minoritas Muslim di Myanmar pada dasarnya memiliki kesamaan dengan masalah yang dihadapi oleh minoritas Muslim di Sri Lanka. Myanmar dan Sri Lanka merupakan negara dengan mayoritas penduduk memeluk agama Buddha. Di Sri Lanka juga terdapat kelompok Buddha ekstrimis atau ultanasionalis yang juga menyebarkan kebencian terhadap minoritas Muslim. Di Sri Lanka, kelompok Buddha juga memiliki hubungan patron-klien dengan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari kedekatan antara pemimpin kelompok BBS Galagoda Aththe Gnanasara Thero dengan Mahinda Rajapaksa. Namun pada akhirnya hubungan tersebut dapat diakhiri seiring dengan terpilihnya pemimpin baru di Sri Lanka, yang berani menindak kelompok Buddha ultanasionalis tersebut.

Saat ini Myanmar dapat dikatakan masih dalam proses transisi menuju pemerintahan yang demokratis. Pemimpin baru Myanmar juga membutuhkan waktu yang cukup untuk mengkonsolidasikan pemerintahannya guna tercipta pemerintahan yang benar-benar stabil. Hal ini juga menjadi pertimbangan bagi Partai NLD sebagai pemenang pemilu. Apalagi pengaruh militer juga masih sangat kuat di Myanmar. Satu-satunya jalan bagi minoritas Muslim di Myanmar untuk memperjuangkan haknya adalah berupaya untuk menarik perhatian masyarakat internasional untuk “menekan” Pemerintah Myanmar agar benar-benar menjadi negara yang demokratis, menjunjung tinggi HAM, serta memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh warga negaranya.

Dalam hal ini, kondisi eksternal juga berpengaruh terhadap masa depan minoritas Muslim di Myanmar. Pemberitaan media internasional serta *stereotyping* yang dilakukan oleh negara-negara Barat terhadap Muslim juga ikut menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan islamophobia secara global. Oleh karena itu, diharapkan bahwa media dan negara-negara Barat dapat memperbaiki prasangka buruk masyarakat internasional terhadap Muslim dengan tidak mengidentikkan semua Muslim sebagai teroris. Karena pada dasarnya hanya sebagian kecil Muslim yang tergabung dalam kelompok Islam ekstrimis lah yang melakukan teror. It should be War on Terror, not War on Islam or Moslem.

Referensi

Ebook

Allen, Christopher. 2010. *Islamophobia*. Surrey: Ashgate Publishing Ltd
Juergensmeyer, Mark. 1994. *The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State*. London: University of California Press Ltd

Thesis

Biver, Emilie. 2014. *Religious Nationalism: Myanmar and the role of Buddhism in Anti-Muslim Narratives, An analysis of Myanmar's ethnic conflicts through the lens of Buddhist nationalism*. Thesis. Lund University. Master of Science in Global Studies, Department of Political Science

Journal or Report

- Claydon, David. 2005. *The Impact on Global Mission of Religious Nationalism and 9/11 Realities*. Lausanne Occasional Paper No.50 Issue Group No.21
- International Crisis Group. 2013. *The Dark Side of Transition: Violence Against Muslims in Myanmar*. Asia Report No.251
- Kloes, Andrew Alan. 2011. *Burma*. Diakses dari [http://www.state.gov/documents/organization/171649.pdf] pada 12 Juni 2016
- Richardson, Robin (Ed). 1997. *Islamophobia a Challenge for Us All*. Report of the Rummymede Trust Commission on British Muslim and Islamophobia p.1
- Szep, Jason. 2013. *The War on the Rohingyas*. Diakses dari [http://www.pulitzer.org/files/2014/international-reporting/reuters/05reuters2014.pdf] pada 12 Juni 2016
- Walton, Matthew J. & Susan Hayward, 2014. *Contesting Buddhist Narratives: Democratization, Nationalism, and Communal Violence in Myanmar*. Honolulu: East-West Center Publications, Policy Studies 71

Artikel Berita

- Allchin, Joseph. 2012. *The Most Persecuted Group in Asia*. Diakses dari [http://www.economist.com/blogs/banyan/2012/06/myanmars-minorities] pada 12 Juni 2016
- Arbour, Louise. 2012. *Kasus Rohingya Mengancam Reformasi Myanmar*. Diakses dari [http://internasional.kompas.com/read/2012/11/20/12191521/Kasus.Rohingya.Mengancam.Reformasi.Myanmar] pada 21 Oktober 2015
- Assalam, Abdullatif. 2016. *Umat Muslim Dilarang Masuk Desa Ini*. Diakses dari [http://rimanews.com/internasional/asia/read/20160525/282546/Umat-Muslim-Dilarang-Masuk-Desa-Ini] pada 10 Juni 2016
- CBC. 2015. *Why Burma's Rohingya Muslims are Among the World's Most Persecuted People*. Diakses dari [http://www.cbc.ca/news/world/why-burma-s-rohingya-muslims-are-among-the-world-s-most-persecuted-people-1.3086261] pada 10 Juni 2016
- C. Nisbet, Matthew. 2015. *Islamophobia: Researcher on America's Irrational Fear*. Diakses dari [http://bigthink.com/age-of-engagement/islamophobia-researcher-on-americas-irrational-fear] 10 Juni 2016
- Feldman, Shelly. 2016. *Islamophobia: the causes, consequences, and why we should care*. Diakses dari [https://www.theodysseyonline.com/islamophobia-the-causes-consequences-and-why-we-should-care] pada 12 Juni 2016
- Gearan, Anne. 2013. *Burma's Thein Sein says military "will always have a special place" in Government*. Diakses dari [https://www.washingtonpost.com/world/national-security/burmas-thein-

sein-says-military-will-always-have-a-special-place-in-government/2013/05/19/253c300e-c0d4-11e2-8bd8-2788030e6b44_story.html] pada 12 Juni 2016

Graham, David A.. 2015. *Burma Doesn't Want the Rohingya but Insists on Keeping Them*. Diakses dari [http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/06/burma-rohingya-migration-ban/395729/] pada 10 Juni 2016

Hardoko, Ervan. 2013. *Kerusuhan Sektarian Terus Berlanjut di Myanmar*. Diakses dari [http://nasional.kompas.com/read/2013/05/29/23100125/Kerusuhan.Sektarian.Terus.Berlanjut.di.Myanmar] pada 21 Oktober 2015

Hodal, Kate. 2013. *Buddhist monk uses racism and rumours to spread hatred in Burma*. Diakses dari [https://www.theguardian.com/world/2013/apr/18/buddhist-monk-spreads-hatred-burma] pada 12 Juni 2016

Hutton, Robert. 2014. *Buddhist Nationalism in Myanmar and Sri Lanka*. Diakses dari [http://www.thesechange.org/2014/12/buddhist-nationalism/#more-76] pada 12 Juni 2016

Kaplan, Sarah. 2015. *The serene-looking Buddhist Monk accused of Inciting Burma's sectarian violence*. Diakses dari [https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2015/05/27/the-burmese-bin-laden-fueling-the-rohingya-migrant-crisis-in-southeast-asia/] pada 10 Juni 2016

Kristanti, Elin Yunita. 2014. *Dalai Lama: Hentikan Kekerasan terhadap Umat Muslim*. Diakses dari [http://news.liputan6.com/read/2074714/dalai-lama-hentikan-kekerasan-terhadap-umat-muslim] pada 6 Juni 2015

Marshall, Andrew R.C.. 2013. *Special Report: Myanmar Gives Special Blessing to Anti-Muslim Monks*. Diakses dari [http://www.reuters.com/article/us-myanmar-969-specialreport-idUSBRE95Q04720130627] 12 Juni 2016

Mastin, Luke. 2008. *Nationalism*. Diakses dari [http://www.philosophybasics.com/branch_nationalism.html] pada 10 Juni 2016

McPherson, Poppy. 2015. *No Vote No Candidates: Myanmar Muslims Barred From Their Own Election*. Diakses dari [https://www.theguardian.com/world/2015/nov/03/no-vote-no-candidates-myanmars-muslims-barred-from-their-own-election] pada 10 Juni 2016

Nilsen, Marte. 2015. *Buddhist nationalism threatens Myanmar's democratic transition*. Diakses dari [http://www.eastasiaforum.org/2015/03/12/buddhist-nationalism-threatens-myanmars-democratic-transition/] pada 12 Juni 2016

Strathern, Alan. 2013. *Why Are Buddhist Monks Attacking Muslims?*. Diakses [http://www.bbc.com/news/magazine-22356306] pada 21 Oktober 2015

*Islamophobia dan Tindakan terhadap Minoritas Muslim oleh Pemerintah dan Kelompok 969
di Myanmar Tahun 2012-2016*

The Diplomat. 2013. *The Mad Monk of Myanmar*. Diakses dari [http://www.thediplomat.com/2013/07/the-mad-monks-of-myanmar/] pada 12 Juni 2016

Win, Swe. 2015. *Will there be Any Muslim MPs in Myanmar's Parliament?*. Diakses dari [http://www.myanmar-now.org/news/i/?id=a493c069-b412-4f77-9cfb-e7edbd17dbea] pada 12 Juni 2016